

# **STUDI KEBIJAKAN KELAS AKSELERASI SMU PLUS PROVINSI RIAU**

Oleh:

**ROSNANI**

(Dosen Universitas Muhammadiyah Riau)

## **ABSTRAK**

Sekolah unggul seperti SMU Plus dalam menjembatani kepentingan siswa yang memiliki keunggulan lebih dari siswa lain. Oleh karenanya, penyelenggaraan kelas akselerasi seharusnya lancar karena input anak pintar. Ternyata tidak sesuai dengan seharusnya. Untuk itu dilakukan studi terhadap kebijakan kelas akselerasi di SMU Plus, pelaksanaan kebijakan tersebut dan alasan penutupan kelas akselerasi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara, angket dengan dokumentasi. Hasil wawancara dengan dipertegas dengan angket kepada 10 orang guru. Temuan penelitian terdiri dari tiga poin yaitu: 1. Perencanaan target yang ingin dicapai dalam pembukaan kelas akselerasi tidak terlepas dari peningkatan ilmu, iman dan amal, serta mempunyai sains dan teknologi. 2. Kebijakan SMU Plus Provinsi Riau dalam kurikulum yang dilaksanakan sama dengan di sekolah SMU Plus lain tetapi memperkaya khasanah muatan lokal. 3. Berdasarkan kesepakatan dewan komite sekolah, guru dan kepala sekolah, maka kelas ini ditutup kembali.

Kata kunci: *Kelas Akselerasi, Studi Kebijakan, SMU Plus Riau.*

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan keharusan mutlak bagi manusia, karena manusia tidak akan dapat berkembang sebagaimana mestinya tanpa pendidikan. Immanuel Khan menyebutkan bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia karena proses pendidikan. Manusia memiliki potensi, yang hanya dapat berkembang melalui proses pendidikan.<sup>1</sup> Pendidikan juga sering dilabelkan sebagai lambang kemajuan sebuah negara, sehingga untuk melihat maju mundurnya sebuah negara, dapat diindikasikan dengan mengamati kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Oleh karena itu pendidikan mempunyai posisi penting dalam mengangkat derajat dan martabat bangsa. Demikian juga, untuk melihat maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan dapat dilihat dari prestasi-prestasi yang diraih serta ditopang dengan kepemimpinan manajer (kepala sekolah). Seorang kepala sekolah adalah penanggung jawab atas berlangsungnya proses pendidikan. Kepala sekolah sebagai individu juga merupakan suatu kepribadian yang berhadapan langsung dengan sejumlah individu lain yang masing-masing merupakan suatu kepribadian. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan, mengatur, dan memotivasi bawahannya agar giat bekerja dengan penuh disiplin serta sesuai aturan yang digariskan (ditetapkan).

Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjukkan perencanaan yang diarahkan kepada sebuah gerakan (*action*) dengan pernyataan-pernyataan ideal.

Kebijakan hendaknya dipahami sebagai rangkaian yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada suatu keputusan tersendiri. Bila ditelusuri lebih lanjut, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan formal sekolah. Di dalam proses belajar mengajar, guru sebagai pengajar bagi siswa harus benar-benar memiliki kompetensi dalam bidang dan jurusan masing-masing.

Seorang guru dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran mempunyai tugas yang sangat berat karena beratnya tugas guru, maka harus diadakan persiapan yang cukup. Persiapan itu meliputi aspek-aspek mental, kemampuan atau kompetensi keguruan dan sejumlah keterampilan yang berhubungan dengan profesinya. Sejalan dengan itu, kebijakan dalam perencanaan pembukaan kelas akselerasi sangat dibutuhkan *stakeholders*. Untuk itu,

---

<sup>1</sup> Sumarsono, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1991), hlm. 12.

ddibutuhkan sekolah-sekolah unggul seperti SMU Plus Provinsi Riau dalam menjembatani kepentingan anak didik yang memiliki keunggulan lebih dari anak didik lain.

Adapun sebab-sebab dibukanya kelas akselerasi, terutama di Kota Pekanbaru terkait dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan pendidik, anak didik maupun pemerintah. Secara ringkas, dibukanya kelas akselerasi adalah dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas belajar siswa di sekolah, disamping memicu semangat bersaing siswa dengan teman-temannya, dengan diadakannya kelas akselerasi ini diharapkan persaingan semakin kompetitif dapat berlangsung secara terus-menerus, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Penyebab lain adalah untuk menjembatani anak-anak didik yang memiliki IQ diatas rata-rata dalam menyalurkan aspirasinya serta membekali mereka dengan target keunggulan tertentu sehingga mampu mengungguli teman-teman yang lain dan lebih cepat menyelesaikan studi dibanding teman-teman yang memiliki IQ di bawah mereka. Untuk itu pula kepala sekolah melaksanakan kelas akselerasi berdasarkan kepekatan semua guru serta dukungan berbagai pihak (baik pemerintah maupun swasta).

Pada tahun 2001 mulai dilaksanakan program penyelenggaran kelas akselerasi bagi siswa kelas I, maka setelah diuji/ditest dari 105 siswa, yang dinyatakan berhak mengikuti kelas akselerasi adalah 24 orang, lalu mengundurkan diri 6 orang sehingga menjadi 18 siswa, kemudian menyusul pengunduran diri 2 orang lagi, dan yang sampai menamatkan kelas akselerasi hanya 16 siswa.

Berdasarkan wawancara awal terhadap salah seorang guru SMU Plus, terungkap bahwa siswa yang mengundurkan diri diduga mempunyai berbagai alasan antara lain:

1. Siswa kelas akselerasi harus menambah biaya pendidikan sebesar Rp. 125.000/bulan, sedangkan kelas reguler tidak ada biaya tambahan (bebas biaya).
2. Para siswa merasa terbebani dalam belajar karena terpacu dengan cepat (terpaksa).
3. Siswa kurang sosialisasi karena selalu sibuk bersaing, mempersiapkan diri.
4. Siswa kurang mempunyai kesempatan berolah raga.

Kebijakan kepala sekolah dalam membuka kelas akselerasi yang diselenggarakan di SMU Plus Provinsi Riau, komite sekolah menargetkan mampu menamatkan studi bahwa siswa hanya dalam jangka 2 (dua tahun). Ini berarti satu tahun pelajaran diselesaikan dalam 8 (delapan bulan),

sehingga selama 24 bulan para siswa yang ada dikelas akselerasi mampu menyelesaikan studi di SMU. Ujian semester diadakan setiap 4 bulan, berbeda dengan waktu ujian kelas reguler yang diadakan setiap 6 bulan.

## **B. PEMBAHASAN**

Kebijakan adalah sebagai satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu maksud.<sup>2</sup> Defenisi yang diberikan oleh Fredrich menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan itu tidak hanya dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tapi juga oleh kelompok atau individu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai definisi kebijakan publik yang penting, sekalipun maksud dan tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami.<sup>3</sup> Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi, dalam menjalankan fungsinya, ia terkadang berkedudukan sebagai manager.

Prinsip-prinsip manajemen pendidikan disekolah harus diperhatikan oleh kepala sekolah. Diantara lain prinsip tersebut adalah 1. Perencanaan secara jelas sederhana, fleksibel, dan seimbang. 2. Organisasi tegas. 3. *Staffing* secara tepat; *the right man on the right place*. 4. Pengarahan secara terus menerus-menerus oleh setiap unsur pimpinan kepada bawahan. 5. Koordinasi yang menimbulkan suasana kerja dan kerja sama secara harmonis. 6. Pengawasan secara cermat sehingga terhindar dari penyimpangan-penyimpangan kegiatan. Pelaporan yang dapat dimanfaatkan untuk memelihara dan mengembangkan hal-hal yang baik dan mungkin dari terhalangnya kegagalan. 8. Pembiayaan yang hemat merata dan dapat dipertanggung jawabkan. 9. Pelaksanaan berlangsung secara tertib, lengkap tepat, dan cepat sehingga siap pakai. 10. Peka terhadap pembaruan agar dapat melayani proses pendidikan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Media Pressindo, 2005), hlm. 19.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>4</sup> Suryosubroto, B, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 76.

Kesepuluh prinsip-prinsip ini bila dijalankan oleh kepala sekolah akan dapat membuahkan hasil akhir (*ultimate goal*) yang mengagumkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga memungkinkan pencapaian yang maksimal sesuai dengan harapan para guru dan orang tua siswa, serta masyarakat sekolah.

1. Tahap Penyusunan Agenda. Dalam hal ini kepala sekolah dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan, pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan yang lain ditunda untuk waktu yang lama.
2. Tahap Formulasi Kebijakan. Kepala sekolah sebagai leader dan motivator dituntut membawa perubahan yang berarti pada sekolah yang ia pimpin. Dalam mengelola perubahan, kepala sekolah mesti dapat melahirkan 6 (enam) hal yang mendukung formalisasi kebijakan yang diperlukan, yaitu: menemukan, mengkomunikasikan, mengkaji dan menganalisis, mencari dukungan, mencoba dan menerima perubahan.<sup>5</sup>Dengan enam langkah (formulasi kebijakan) diatas, diharapkan perubahan akan terjadi dan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penerapan kebijakan diatas, diharapkan kepala sekolah mampu mengambil berbagai kebijaksanaan yang membawa inovasi (perubahan) serta menerapkan kepemimpinan yang visioner, memiliki gambaran tentang sekolah yang dicita-citakan, serta mampu membimbing, mendorong dan mengorganisasikan tenaga kependidikan, masyarakat, dan lingkungan sekitar dengan baik.
3. Tahap Adopsi Kebijakan. Tahap adopsi kebijakan dapat diambil dari berbagai kalangan, dengan syarat pengadopsian kebijakan-kebijakan tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan bersama yang akan dirumuskan. Seorang pimpinan maupun anggota bisa saja mengusulkan kebijakan mana yang harus diadopsi, asalkan bisa disepakati oleh mayoritas anggota kelompok organisasi.
4. Tahap Implementasi Kebijakan. Sehubungan dengan itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecah masalah, khususnya di SMU Plus Provinsi Riau harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi yang memobilisasi sumber daya *financial* dan manusia. Tahap adopsi kebijakan pelaksanaan kelas akselerasi di

---

<sup>5</sup> Mulyasa, E, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 58.

pelopori oleh kepala sekolah dan para guru, pada hakikatnya mengacu kepada konsep MMT (*Manajemen Mutu Terpadu*) atau diisitilahkan dengan *Total Quality Management*. Manajemen mutu terpadu adalah (*Total Quality Management*) merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.<sup>6</sup>

5. Tahap Evaluasi/Penilaian Kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau di evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah, yakni bagaimana kualitas pendidikan bisa meningkat secara drastis. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang di inginkan, dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi oleh kualitas pendidikan bagi anak-anak pintar (anak didik yang memiliki IQ tinggi). Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

### **Hakikat Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Kurikulum merupakan *salah* satu alat mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat sekolah.<sup>7</sup> Rialis Kamsa dalam makalah “*Kurikulum Berbasis Kompetensi*” setiap pergantian kurikulum selalu dibarengi dengan sosialisasi tersebut dan adanya penataran guru sebagai pelaksana kurikulum sekolah. Keberhasilan penerapan kurikulum baru (sebagai kurikulum lama) sangat tergantung kepada keberhasilan pelaksana kurikulum tersebut dan penataran bagi guru-guru di sekolah.<sup>8</sup>

Begitu pentingnya peranan guru sehingga menurut Syafrudin Nurdin dan Basyiruddin Usman mengatakan: “Kurikulum merupakan implementasi dari *official curriculum* di dalam kelas. Beberapa ahli menyatakan bahwa betapapun bagusnya kurikulum, tetapi hasilnya sangat tergantung pada apa yang dilakukan oleh guru dan murid dalam kelas, dengan demikian guru

---

<sup>6</sup> Siswanto, H.B., *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 78.

<sup>7</sup> Sudirman, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 16.

<sup>8</sup> Kamsa, Rialis, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 91.

memegang peranan penting baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan (implementasi) kurikulum”.<sup>9</sup>

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dapat didefinisikan sebagai suatu proses penempatan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum (Kurikulum Potensial) dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.<sup>10</sup>

### **Kelas Akselerasi**

Kelas akselerasi diambil dari istilah bahasa Inggris yaitu *class* dan *accelerated*. *Class* artinya kelas, sedang *accelerated* adalah percepatan. Kelas akselerasi dengan *accelerated learning*, merupakan konsep belajar berdasarkan kehidupan manusia secara alamiah. Belajar dipercepat bertujuan untuk mengurangi sifat mekanistik dan berupaya memanusiakan siswa dalam proses pembelajaran, serta menempatkan siswa sebagai pusat (*student centered*) dalam sistem pembelajaran. Ia juga mengemukakan bahwa siswa bukan diisi oleh informasi melainkan “*ignited*”, seperti percikan bunga api listrik di dalam silinder mesin mobil yang dapat membakar campuran bensin dan udara sehingga menghasilkan energi, artinya siswa diberi rangsangan sehingga mereka termotivasi untuk belajar dan berlatih dengan menggunakan segala potensi yang dimilikinya dan berusaha keras untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

Program percepatan (akselerasi belajar) adalah program layanan pendidikan pada jalur sekolah yang diberikan khusus kepada siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa untuk menyelesaikan belajar lebih awal dari waktu yang ditentukan. Secara khusus tujuan akselerasi menurut Muchtarudin (dalam makalah seminar pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2005) adalah :

- a) Meningkatkan motivasi tenaga pendidikan agar pelayanan terhadap siswa dapat tercapai optimal.
- b) Memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran untuk memacu peserta didik dalam meningkatkan persentase daya serap hasil pembelajaran.

---

<sup>9</sup> Nurdin, Syaifuddin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, ( Jakarta: Ciputat, 2002), hlm. 24.

<sup>10</sup> Ibid, Mulyasa....hlm. 15.

- c) Dengan sarana-prasarana yang memadai mampu menunjang kebutuhan proses pembelajaran serta menyalurkan kemampuan dan kecerdasannya.

Prinsip-prinsip belajar yang dipercepat diantaranya adalah: pembelajaran menyeluruh, pembelajaran adalah kreasi bukan konsumsi. 3.pembelajaran kolaboratif, dalam pembelajaran siswa dapat menerima sesuatu dari berbagai tingkat secara simultan, belajar adalah mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dan belajar dengan menggunakan keseluruhan otak. Belajar yang dipercepat bertujuan untuk membangkitkan siswa hingga pada tingkat kemampuan belajar penuh dan mencapai kebahagiaan manusiawi, tingkat intelegensi dan kompetensi yang tinggi serta mencapai keberhasilan.

### **Quantum Learning and Teaching (QLT)**

*Quantum Learning* berakar dari upaya Dr. George Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebut “*suggestology*” atau “*suggestopedia*”. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif atau negatif.

Dewasa ini, bermunculannya sekolah unggulan maupun sekolah plus, merupakan salah satu jawaban dari majunya peradaban dan pendidikan. Untuk itu, para pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan telah merancang sebuah model pembelajaran yang dipercepat yang dinamakan dengan pembelajaran akselerasi. Untuk mengetahui beberapa kebijakan kepala sekolah SMU Plus Provinsi Riau dalam merencanakan pembukaan kelas akselerasi, perencanaan maupun menutup kembali kelas akselerasi akan di dipaparkan melalui hasil wawancara dengan kepala sekolah serta didukung oleh wawancara terstruktur terhadap 10 orang guru di SMU Plus Provinsi Riau. Wawancara terstruktur dalam bentuk angket dibagi kepada 3 (tiga) alternatif kebijakan yaitu: 1. Yang melatarbelakangi kebijakan diadakannya kelas akselerasi SMU Plus. 2. Pelaksanaan kelas akselerasi SMU Plus. 3. Yang melatarbelakangi ditutupnya kelas akselerasi SMU Plus.

1. Yang melatarbelakangi dibukanya kelas akselerasi SMU Plus menurut kepala sekolah SMU Plus adalah tidak lepasnya dari keinginan untuk menjembatani anak-anak pintar di Provinsi Riau. Keinginan ini muncul agar anak didik yang memiliki IQ diatas rata-rata dapat menamatkan studi lebih awal dari siswa yang berada dibawahnya, sehingga dengan rencana pembukaan ini

diharapkan setiap anak didik akan berpacu dalam meningkatkan prestasinya dikelas. Untuk mendukung hasil wawancara tersebut penulis menyebarkan angket terstruktur kepada 10 orang guru. Dari 8 orang (80%) guru menyatakan, latar belakang rencana pembukaan kelas akselerasi disebabkan para guru menginginkan percepatan pendidikan bagi anak-anak pintar, hanya 2 orang (20%) guru yang memberikan jawaban karena faktor kebutuhan anak didik.

2. Dalam pelaksanaan kelas akselerasi SMU Plus beragam upaya dilakukan untuk mensosialisasikan pemahaman masyarakat terhadap kelas akselerasi, dengan mengadakan lobi atau pendekatan terhadap pihak-pihak terkait dengan dunia pendidikan, seperti mengadakan pertemuan dengan Pemda, dengan menyakinkan berbagai pihak bahwa kelas akselerasi akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di SMU Plus Provinsi Riau. Setelah kelas akselerasi dibuka di SMU Plus, pihak sekolah mengadakan jadwal promosi ke sekolah-sekolah menengah pertama yang ada di kota Pekanbaru dan kabupaten-kabupaten lain. Di SMU Plus maupun di kelas akselerasi mempergunakan kurikulum yang berlaku sesuai dengan kurikulum terbaru. Kurikulum itu bisa saja didesain atau dimodel melalui pendekatan kurikulum berbasis sekolah sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh sekolah. Selain itu SMU Plus juga menjalin kerja sama dengan mitra belajar dengan mengadakan pertukaran siswa untuk studi selama seminggu dengan para pelajar Singapura. Pertukaran siswa ini dalam rangka menimba pengalaman serta mempererat silaturahmi di antara siswa, di samping menopang wawasan mereka dalam menuntut ilmu pengetahuan.

3. Yang melatar belakangi ditutupnya kelas akselerasi SMU Plus adalah karena kesepakatan bersama (antara kepala sekolah, komite dan guru) maka kelas akselerasi ditutup untuk sementara, penutupan ini juga disebabkan adanya permintaan orang tua yang kurang setuju anaknya di akselerasi, sehingga permintaan orang tua ini ternyata berakibat kepada anak-anak lain yang pada akhirnya mengikuti jejak teman-temannya. Kesimpulan akhir dari penutupan kelas akselerasi ini disebabkan belum profesionalnya para guru dalam memberi motivasi, mendesain pembelajaran, memberikan atau mendobrak minat belajar agar tidak membosankan anak didik serta kurang terarturnya menu makanan atau gizi yang dikonsumsi serta kekurangan olah raga. Akibatnya berdampak pada menurunnya stamina siswa serta membuat mereka mudah bosan, kurang bergairan serta merasa dipaksa untuk menyelesaikan garis finish yang semestinya belum selesai atau mereka diarahkan untuk mencapai suatu target tertentu, padahal usia mereka untuk mencapai target tersebut belum cukup dewasa. Inilah

kendala-kendala yang dihadapi para siswa kelas akselerasi sehingga orang tua siswa banyak yang kurang setuju jika anaknya dipaksa untuk menyelesaikan studi dalam dua tahun.

Dengan ditutupnya kelas akselerasi membuktikan bahwa sekolah ini telah gagal dalam menyelenggarakan sebuah program atau model pembelajaran yang dipercepat (kelas akselerasi). Kegagalan sekolah tentu disebabkan faktor-faktor yang telah dipaparkan diatas, terutama disebabkan keberatan orang tua atau tuntutan orang tua yang kurang setuju untuk memasukkan anak-anak mereka kedalam kelas akselerasi. Ketidaksetujuan orang tua bukan disebabkan penerapan program ini kurang bagus, akan tetapi disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor kecemasan terhadap anak, karena dalam pandangan orang tua anak-anak yang belajar di kelas akselerasi seolah-olah dipaksa belajar dalam mencapai sebuah target yang semestinya belum bisa diserap secara baik, disisi lain kegagalan ini juga disebabkan para siswa yang sering mengeluh dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah para guru di SMU Plus Provinsi Riau dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan mereka melalau teori-teori kelas akselerasi serta teori-teori pembelajaran melalui Quantum Learning Teaching, penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang saling mendukung dengan penerapan atau aplikasi penyelenggaraan kelas akselerasi dalam dunia pendidikan. Manfaat kedua adalah menambah wawasan kepala sekolah dalam penyelenggaraan atau pembukaan kelas akselerasi untuk masa-masa yang akan datang. Dan bukan tidak mungkin bahwa dimasa-masa mendatang, pelaksanaan kelas akselerasi yang sama akan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kecerdasan dan permintaan orang-orang yang berkompeten dalam bidang ini, termasuk orang-orang yang peduli dengan peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia, khususnya Provinsi Riau.

### **C. PENUTUP**

Kebijakan Kepala SMU Plus Provinsi Riau terhadap kelas akselerasi dibagi kepada tiga bagian yaitu :

1. Kebijakan pembukaan kelas akselerasi adalah berdasarkan sekolah favorit, siswa disaring dari bibit – bibit unggul yang ada di Provinsi Riau, Input terdiri dari dari siswa yang memiliki IQ menengah ke atas.

2. Kebijakan SMU Plus Provinsi Riau dalam pelaksanaan kelas akselerasi, setelah SMU Plus memperoleh dukungan dalam merencanakan pembukaan kelas akselerasi, kebijakan kepala sekolah dilanjutkan dengan mengadakan promosi ke beberapa Sekolah Menengah Pertama, baik yang ada di Kota Pekanbaru maupun di luar kota
3. Kebijakan SMU Plus Provinsi Riau menutup kelas akselerasi. Kebijakan dalam menutup kelas akselerasi disebabkan banyaknya permintaan orang tua agar anaknya dimasukkan ke dalam kelas biasa saja, hal ini dikarenakan orang tua khawatir anak mereka akan tertekan dan merasa dipaksa ketika belajar di sekolah. Akhirnya, berdasarkan kesepakatan dewan komite sekolah, guru dan kepala, maka kelas ini ditutup kembali.

### **Bibliografi**

- Arikunto, Suharsimi. 1997 *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamsa, Rialis. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Syaifuddin dan Basyiruddin Usman. 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Ciputat: Remaja Rosdakarya.
- Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suderajat, Hari. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK); Pembaharuan Pendidikan dalam Undang-undang Sisdiknas 2003*. Bandung: Cipta Cekas Grafika.
- Sudirman. 1992. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumarsono. 1991. *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suryosubroto, B. 1999. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Cet. Ketiga. Jakarta: Media Pressindo.